

**KINERJA PEGAWAI UPT. PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR DALAM MEMERIKSA KELAYAKAN
KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA
SAMARINDA**

Mohammad Rizky Chaidir¹

**eJournal Administrasi Negara
Volume 4, Nomor 4, 2016**

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : rzkychaidir@yahoo.co.id

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Kinerja Pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Dalam
Memeriksa Kelayakan Kendaraan Bermotor Di Kota
Samarinda

Pengarang : Mohammad Rizky Chaidir

NIM : 1202015167

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi
Administrasi Negara Fisip Unmul.

Samarinda, 15 November 2016

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Farhanuddin Jamanie, M.Si
NIP. 19540706 198301 1 002

Dr. Heryono Susilo Utomo, M.Si
NIP. 19591023 198803 1 010

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH PROGRAM STUDI

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Administrasi Negara	KETUA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
Volume : 4	
Nomor : 4	
Tahun : 2016	
Halaman : 5009-5022 (Ganjil)	<u>Dr. Enos Paselle, M.AP</u> NIP. 19740524 200501 1 002

KINERJA PEGAWAI UPT. PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM MEMERIKSA KELAYAKAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA SAMARINDA

Mohammad Rizky Chaidir¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kinerja pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor dalam memeriksa kelayakan kendaraan bermotor di Kota Samarinda dan mengklarifikasi faktor penghambat Kinerja Pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor dalam memeriksa kelayakan kendaraan bermotor di Kota Samarinda.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Informan kunci pada penelitian ini yaitu Kepala UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Samarinda beserta Kasubag dan Pegawai. Sedangkan informan yang dipilih yaitu masyarakat yang sedang melakukan pengujian kendaraan bermotor di UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Samarinda. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Samarinda memberikan hasil kerja secara kualitas telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan terutama dalam pemeriksaan/uji kelayakan kendaraan bermotor cukup baik. Komunikasi pegawai tidak ada masalah mulai dari komunikasi antara atasan dengan bawahan. Kedisiplinan pegawai sudah cukup baik. Adapun penghambat adalah adanya gangguan kerusakan pada alat uji, sarana dan prasarana yang dapat menghambat kinerja pegawai, selain itu masyarakat juga kurang paham dengan prosedur yang ada.

Sehingga disimpulkan kinerja pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor dalam memeriksa kelayakan kendaraan bermotor di Kota Samarinda sudah cukup baik, hanya saja masih kurang optimal disebabkan adanya gangguan kerusakan pada alat uji dan kurang pemahannya masyarakat dengan prosedur yang ada.

Kata Kunci : *Kinerja, UPT. PKB, Kelayakan Kendaraan Bermotor*

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : rzkychaidir@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, berencana dan berdasarkan skala prioritas. Pemerintah sebagai pemegang peran penting dalam pembangunan nasional bertanggung jawab untuk berusaha mewujudkan pembangunan nasional agar terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat. Program-program pembangunan yang pemerintah rencanakan tentunya akan dilaksanakan atau dijabarkan oleh perangkatnya yang berwenang dari tingkat pusat hingga tingkat desa. Kegiatan operasional ini dilaksanakan secara bertahap dengan harapan dapat mewujudkan program-program tersebut sehingga tercipta suatu hasil yang memuaskan bagi masyarakat.

Berbicara tentang pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya, maka diketahui tanggungjawab pemerintah bertugas untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur pada semua aspek kehidupan secara adil dan merata. Sebagai suatu proses yang berkeseluruhan, pembangunan nasional disusun secara terencana, terarah dan terpadu dalam mewujudkan tujuan. Pembangunan nasional juga diselenggarakan pemerintah yang dijabarkan dalam kegiatan yang bersifat operasional, untuk dilaksanakan oleh perangkatnya mulai dari tingkat pusat hingga tingkat desa secara keseluruhan di wilayah Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar seluruh masyarakat secara merata dapat berperan serta dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dan dapat menikmati hasil pembangunan yang dicapai.

Pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yang bertugas untuk mengatur daerahnya masing-masing agar kesejahteraan rakyat tidak hanya dirasakan di pusat tetapi juga di daerah. Pada tingkatan daerah dikenal istilah SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas untuk mengatur roda pemerintahan agar sesuai dengan apa yang diinginkan kepala daerah dan sesuai dengan peraturan daerah yang ditetapkan demi terciptanya pembangunan nasional.

Pelaksanaan pembangunan nasional tidak terlepas dari adanya masalah yang perlu mendapat perhatian cukup besar seperti yang terjadi di Indonesia adalah masalah tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Masalah ini sering kita jumpai di kota-kota besar yang ada di Indonesia contohnya yaitu Jakarta. Hal ini dikarenakan rendahnya kualitas lalu lintas dan angkutan jalan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Padahal keberadaan transportasi merupakan urat nadi perkembangan pembangunan, serta sebagai penunjang segala jenis kebutuhan yang ada kaitannya dengan perhubungan dan transportasi seperti untuk kendaraan bermotor jenis kendaraan bus kendaraan barang, kendaraan khusus dan kendaraan umum.

Seiring meningkatnya mobilitas dan jumlah permintaan pasar kendaraan ini membuat pemerintah mestiantisipasi agar nanti tidak menimbulkan masalah kedepannya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi yaitu setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan peruntukannya, memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan serta sesuai dengan kelas jalan yang dilalui. Dimana faktor-faktor penyebab rendahnya kualitas lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia juga disebabkan oleh berbagai faktor dan masalah lain yang cukup

kompleks, salah satunya yaitu kinerja dari organisasi yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan.

Kinerja suatu organisasi sangat penting karena tingkat pencapaian hasil akan terlihat sehingga diketahui seberapa jauh pula tugas yang telah dipikul melalui tugas dan wewenang yang diberikan dapat dilaksanakan secara nyata dan maksimal. Pada era reformasi sekarang ini, kinerja pemerintah mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Dengan adanya kebebasan dalam menyampaikan pendapat, banyak ditemukan kritikan yang pedas terhadap kerja pemerintah, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Kritikan tersebut tanpa terkecuali mulai dari pemerintah pusat sampai ke pemerintahan terendah.

Adapun dinas/instansi yang memiliki peran penting untuk memberikan arahan dalam lalu lintas dan angkutan jalan adalah Kantor UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan, sesuai dengan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam hal ini Kantor UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas menegakan Undang-Undang dan pengujian kelayakan kendaraan bermotor. Melalui pengujian kendaraan bermotor maka diharapkan akan terciptanya kualitas lalu lintas dan angkutan jalan yang baik, karena pengujian kendaraan bermotor menyangkut keselamatan pengguna kendaraan di jalan.

Kota Samarinda merupakan ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu kota yang cukup disoroti dalam masalah kendaraan bermotor, khususnya kendaraan bermotor yang bermuatan barang dan angkutan jalan yang berpenumpang. Hal ini dikarenakan masih sering terjadinya kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Samarinda, yaitu pada tahun 2015 angka kecelakaan mencapai 133 peristiwa kecelakaan lalu lintas, dengan jumlah meninggal dunia mencapai 56 jiwa yang disebabkan masalah teknis kendaraan seperti rem blong karena beban yang berlebihan (*over load*) banyak dijumpai pada kendaraan pengangkut barang yang merusak jalan, akibatnya waktu yang dibutuhkan untuk perjalanan angkutan barang bertambah lama, menimbulkan kerawanan, keselamatan, kemacetan, keamanan dan kenyamanan berlalu lintas. Kemudian kecepatan laju kendaraan yang tidak terkontrol ini juga merupakan faktor penyebab kecelakaan di jalan raya.

Tingginya angka kecelakaan di Kota Samarinda ini, dapat disebabkan karena kurang optimalnya kinerja UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor dalam pengujian kelayakan kendaraan bermotor. Padahal diketahui setiap hari kantor UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor bisa memeriksa sekitar 100 (seratus) hingga 200 (dua ratus) kendaraan. Berdasarkan observasi pada masyarakat yang memeriksakan kendaraannya di UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor mengemukakan bahwa terdapat pegawai kurang tanggap dalam pemeriksaan kendaraan sehingga terjadi antrian yang cukup panjang, dan juga ada beberapa pegawai yang terlambat masuk kerja, serta masih banyaknya masyarakat yang menjalankan kendaraan yang sudah tidak layak dioperasikan akibat kurangnya informasi dari pegawai mengenai kelayakan kendaraan bermotor saat memeriksakan kelayakan kendaraan bermotor.

Berdasarkan latar belakang di atas dan pengamatan di lapangan, maka penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan kelayakan kendaraan bermotor yang masih beroperasi di jalan, dengan mengangkat judul mengenai

“Kinerja Pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Dalam Memeriksa Kelayakan Kendaraan Bermotor Di Kota Samarinda”..

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor dalam memeriksa kelayakan kendaraan bermotor di Kota Samarinda?
2. Faktor apa saja yang menghambat kinerja pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor dalam memeriksa kelayakan kendaraan bermotor di Kota Samarinda?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kinerja pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor dalam memeriksa kelayakan kendaraan bermotor di Kota Samarinda.
2. Untuk mengklarifikasi faktor penghambat kinerja pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor dalam memeriksa kelayakan kendaraan bermotor di Kota Samarinda.

Manfaat Penelitian

1. Dari segi teoritis :
 - a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dalam bidang administrasi negara secara khusus.
 - b. Tambahan wawasan serta pengetahuan dan kemampuan untuk membuat karya ilmiah bagi penulis.
2. Dari segi praktis :
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembuat keputusan atau perumus kebijakan dalam upaya pelaksanaannya dapat terlaksana dengan baik.
 - b. Sebagai tambahan informasi bagi semua pihak baik pemerintah, kalangan akademik atau mahasiswa yang tertarik pada masalah yang diteliti.

KERANGKA DASAR TEORI

Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses yang menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tujuan organisasi tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif pegawai ataupun karyawan

Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi dan masyarakat (Flippo dalam Hasibuan, 2010:11).

Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia

Fungsi manajemen sumber daya manusia menurut Simamora (2004:35) adalah :

1. Perencanaan
2. Rekrutmen
3. Seleksi
4. Rekrutment

5. Orientasi, Pelatihan dan Pengembangan
6. Evaluasi kerja
7. Kompensasi
8. Pengintegrasian
9. Pemeliharaan
10. Pemberhentian

Kinerja

Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (per individu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai organisasi.

Ada berbagai pendapat tentang kinerja. bahwa kinerja merupakan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Dari definisi diatas kinerja lebih ditekankan pada tanggung jawab dengan hasil yang diharapkan (Widodo, 2006:78). Selanjutnya pengertian kinerja adalah hasil seseorang secara keseluruhan selama priode tertentu di dalam melaksanakan tugas, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama (Rivai dan Basri, 2011:97).

Tolak Ukur Kinerja

Di dalam sebuah kinerja maka akan ada tolak ukur yang menjadi sebuah patokan agar dalam melaksanakan tugasnya dapat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan indikator masukan (*inputs*) keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). (LAN-RI, 1999:77).

Selanjutnya menurut Simamora (2004:53) ada lima tolak ukur atau dimensi dari kinerja yaitu :

1. Kualitas/mutu
2. Kuantitas/jumlah
3. Kemampuan
4. Penyelesaian pekerjaan/ketepatan waktu
5. Kerjasama

Dalam konteks birokrasi pelayanan publik di Indonesia, pemerintah melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Kepmenpan) Nomor. 81 Tahun 1995, telah memberikan rujukan dalam pemberian pelayanan, seperti:

1. Kesederhanaan
2. Kejelasan
3. Kepastian
4. Keamanan
5. Keterbukaan
6. Efisiensi
7. Ekonomis
8. Keadilan yang merata
9. Tanggungjawab

Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja pada dasarnya digunakan untuk penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan, program dan/atau kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja.

Gery Dessler dalam Pasolong, (2008:182), menyatakan bahwa penilaian kinerja adalah merupakan upaya sistematis untuk membandingkan apa yang dicapai seseorang dibandingkan dengan standar yang ada. Tujuannya, yaitu untuk mendorong kinerja seseorang agar bisa berada diatas rata-rata.

Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

Menurut Steers dalam Asri (2011:99) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah :

1. Kemampuan, keperibadian dan minat kerja.
2. Kejelasan dan pengertian atau penerimaan seseorang atas tugas yang diberikan kepadanya.
3. Tingkat motivasi pekerja yaitu daya energy yang mendorong, mengarahkan dan mempertahankan perilaku.

Kelayakan Kendaraan Bermotor

Kelayakan adalah suatu kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha /proyek dan merupakan bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan, apakah menerima atau menolak dari suatu gagasan usaha /proyek yang direncanakan.

Dalam pengujian kendaraan bermotor ada bagian-bagian dalam kendaraan yang harus diperiksa dan di uji. Bagian-bagian yang diperiksa dan di uji harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan tadi adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan jalan. Kemudian diatur lebih lanjut tentang persyaratan ambang batas layak jalan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 Tentang Persyaratan Ambang Batas Layak Jalan Kendaraan Bermotor.

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor

Sistem dan mekanisme kegiatan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

1. Pendaftaran
2. Penetapan dan pembayaran biaya retribusi
3. Pemeriksaan kendaraan
4. Verifikasi yaitu verifikasi data dan kelengkapan administrasi kendaraan bermotor.
5. Pengesahan
6. Pelaksanaan pra uji kendaraan bermotor meliputi kegiatan :

Tugas dan Fungsi UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor

Adapun yang menjadi tugas dan fungsi UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Samarinda Antara lain :

1. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis perencanaan operasional program kerja UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor dalam upaya pembinaan, pengembangan,

- koordinasi, pengawasan dan pengendalian, evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan yang searah dengan kebijakan umum dinas dan daerah.
2. Pelaksanaan pengkoordinasian kebijakan teknis operasional pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor secara berkala untuk dijadikan rujukan kendaraan bermotor layak jalan atau tidak layak jalan, baik anatar unsur UPT dan Dinas maupun Instansi terkait dan masyarakat.
 3. Pelaksanaan urusan kesekretariatan UPT dan kegiatan teknis operasional pelayanan umum dan teknis penunjang evaluasi penyelenggaraan pengelolaan PKB sesuai dengan kebijakan Dinas yang searah dengan kebijakan umum Daerah.
 4. Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait dan melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan program strategis dan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang dilimpahkan dan atau diperintahkan oleh Kepala Dinas sesuai tupoksi dan tanggung jawab kewenangannya.

Definisi Konsepsional

Di dalam penelitian ini digunakan definisi konsepsional yaitu kinerja pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor dalam memeriksa kelayakan kendaraan bermotor di Kota Samarinda adalah melakukan suatu kegiatan memeriksa kendaraan bermotor yang layak jalan sesuai tanggung jawab pegawai sehingga dapat mencapai hasil sesuai yang diharapkan yang berkaitan dengan komunikasi dan kedisiplinan pribadi yang mempengaruhi tim atau organisasi secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran tentang deskripsi atau suatu keadaan secara subyektif atau obyektif penelitian seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya.

Fokus Penelitian

1. Kinerja pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor dalam memeriksa kelayakan kendaraan bermotor di Kota Samarinda, dengan indikator yaitu :
 - a. Hasil Kerja
 - b. Tanggung Jawab
 - c. Komunikasi
 - d. Kedisiplinan
2. Faktor penghambat kinerja pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor dalam memeriksa kelayakan kendaraan bermotor di Kota Samarinda.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Samarinda.

Sumber Data

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau ada hubungannya dengan objek melalui tanya jawab atau wawancara secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara sesuai dengan fokus penelitian yang penulis teliti. Adapun sumber data yakni:

- a. *Key informan* adalah :
 - 1) Kepala UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Samarinda
 - 2) Kasubag Tata Usaha UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Samarinda
 - 3) Pegawai yang bertugas melakukan pengujian kendaraan bermotor
- b. *Informan* adalah masyarakat yang sedang melakukan pengujian kendaraan bermotor di kantor UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Samarinda.
2. Data Sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data asli. Penulis peroleh melalui sumber informan, yakni :
 - a. Dokumen-dokumen, arsip-arsip, dan laporan-laporan.
 - b. Buku-buku referensi yang terdapat di perpustakaan sesuai dengan fokus penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Kepustakaan *Library Research* yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku – buku sebagai bahan referensi.
2. Penelitian Lapangan *Field Work Research* yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan dengan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:
 - a. Observasi.
 - b. Wawancara.
 - c. Dokumentasi.

Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif, yaitu menggambarkan tentang data dan fakta mengenai objek penelitian maka analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman dan Saldana (2014:31-33) mengatakan bahwa di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data condensation, data display, dan conclusion drawing* atau *verifications*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kinerja Pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Dalam Memeriksa Kelayakan Kendaraan Bermotor Di Kota Samarinda

Pembahasan kinerja pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor dalam memeriksa kelayakan kendaraan bermotor di Kota Samarinda, sesuai indikator pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Hasil Kerja

Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau sekarang disebut sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) diwajibkan untuk mendapatkan penilaian atas pekerjaan/ kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintah. Penilaian atas pekerjaan pegawai negeri sipil ini dituangkan dalam bentuk Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil tersebut memiliki banyak kelemahan sehingga disempurnakan dengan Penilaian Prestasi Kerja PNS. Termasuk merupakan hasil kerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada yang dilayani antara lain

Kinerja Pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (Mohammad Rizky Chaidir) meliputi masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit kerja terkait, dan/atau instansi lain. Menurut pasal 140 Perwali Nomor 15 Tahun 2012 bahwa adanya tugas pokok UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan atau teknis penunjang Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu kelancaran tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan dibidang teknis operasional pelayanan pengujian secara berkala kendaraan bermotor sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria lalu lintas dan teknis penunjang dalam mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan untuk merumuskan perencanaan operasional program kerja UPT yang searah dengan kebijakan Dinas dan Kebijakan umum Daerah.

Untuk mengetahui hasil kerja yang telah dilakukan oleh UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (UPT. PKB) perlu diketahui terlebih dahulu tujuan dari adanya kegiatan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh UPT. PKB, karena dengan mengetahui tujuan dari UPT. PKB maka dapat diketahui hasil kerja yang dicapai oleh UPT. PKB telah baik atau belum. Oleh karena itu terlebih dahulu penulis akan memaparkan tujuan dari pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh UPT. PKB. Adapun tujuan dari diadakannya kegiatan tersebut adalah agar kendaraan bermotor yang akan digunakan di jalan memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan termasuk persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan yang harus dipenuhi. Pengujian kendaraan bermotor dikatakan sesuai dengan apa yang diharapkan, jika telah sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Adapun tujuan dari kegiatan tersebut adalah apa yang telah penulis paparkan diatas dan dimuat dalam aturan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk menilai suatu hasil kerja dari UPT. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor tidak hanya diukur dengan tujuan yang telah tercapai sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, melainkan dapat pula dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas. Kualitas yang dimaksud di sini adalah hasil kerja yang dilakukan dengan ketepatan dan ketelitian dalam melakukan pemeriksaan sedangkan kuantitas diukur dari kemampuan penguji dalam melakukan pengujian pada seberapa banyak kendaraan bermotor yang diuji.

Berdasarkan semua informasi yang penulis peroleh melalui proses wawancara dengan Kasubid Tata Usaha UPT. PKB, petugas pengujian dan masyarakat yang memeriksakan kendaraan bermotornya diketahui bahwa hasil kerja UPT. PKB di Kota Samarinda telah mampu mencapai tujuan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 yaitu agar kendaraan bermotor yang akan digunakan di jalan memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan termasuk persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan yang harus dipenuhi. Selain itu secara kuantitas hasil kerja UPT. PKB dengan 7 orang penguji dapat melakukan pemeriksaan pada ratusan kendaraan dalam sehari dan secara kualitas pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada dan tidak membuat masyarakat menunggu lama.

Hasil kerja Pegawai UPT. PKB sudah menunjukkan hasil yang maksimal, hal ini dibuktikan dengan adanya standar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam membuat hasil uji KIR kendaraan, kemudian di tambah lagi dengan adanya pengawasan secara langsung yang diberikan oleh kasubag kepada para pegawai. hal ini sesuai dengan pendapat Hasibuan (dalam Darmawan, 2013;191)

yang mengatakan bahwa hasil kerja, menilai hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang dapat dihasilkan oleh pegawai/ karyawan tersebut dari uraian pekerjaannya. Menilai hasil kerja adalah sebagai salah satu fungsi manajemen yang berusaha untuk mempertanyakan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan dari suatu rencana sekaligus mengukur seobjektif mungkin hasil-hasil pelaksanaan itu dengan ukuran-ukuran yang dapat diterima pihak-pihak yang mengukur rencana yang meliputi ketepatan, ketelitian, keterampilan serta kebersihan dari pegawai.

Untuk mengatasi kekurangan hasil kerja pegawai diperlukan pengawasan dan pengawasan yang dilakukan oleh kasubag UPT. PKB melalui beberapa tahapan yaitu pengawasan internal dan eksternal. Hal ini sesuai dengan penilaian untuk PNS untuk menilai hasil kerja pegawai.

Tanggung jawab

Dalam mengukur tanggung jawab menurut Hasibuan (dalam Darmawan, 2013:191), menilai kesediaan pegawai/karyawan dalam mempertanggung jawabkan kebijakannya, pekerjaan dan hasil kerjanya, sarana dan prasarana yang dipergunakan, perilaku serta hasil kerja dengan bawahannya. Salah satu wujud tanggung jawab pegawai adalah penggunaan dan pemeliharaan peralatan yang sebaik-baiknya sehingga dapat menunjang kegiatan kantor berjalan dengan lancar. Serta adanya kesanggupan dalam menghadapi pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang pegawai. Tanggung jawab merupakan salah satu hal yang harus ada pada setiap kinerja Pegawai UPT. PKB. Ketika pegawai bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan maka kinerja dari Pegawai UPT. PKB dalam memeriksa kelayakan kendaraan bermotor dapat dilihat dari buku laporan yang dimiliki oleh setiap pegawai, melakukan pengujian dengan tugasnya masing-masing, melakukan pemeriksaan kendaraan-kendaraan di jalan dan membuat buku laporan yaitu e-logbook.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab kerja pegawai UPT. PKB tidak ada masalah, dapat dilihat dari buku laporan yang dimiliki oleh pegawai, dimana buku laporan tersebut diisi dengan hal-hal apa saja yang dikerjakan dan buku laporan ini setiap minggunya akan di serahkan ke Kepala UPT. PKB. Selain itu kegiatan yang dilakukan UPT. PKB ialah melakukan kegiatan memeriksa kendaraan turun kelapangan langsung yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kecelakaan akibat kendaraan yang tidak layak, jika ada kendaraan yang tidak memeriksa kendaraannya di kantor UPT. PKB. Dan tanggung jawab dalam memelihara dan menjaga sarana dan prasarana yang digunakan juga dapat terlihat dari setiap terjadi kerusakan, dalam hal ini Kasubag Tata Usaha yang akan bertanggung jawab dan akan melaporkan ke Kepala UPT. PKB.

Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu unsur penting dalam suatu kegiatan, apa lagi pemeriksaan/pengujian kendaraan bermotor ini bersangkutan dengan masyarakat yang memeriksa/menguji kendaraannya di UPT. PKB. Dengan adanya komunikasi akan membuat pekerjaan tersebut akan berjalan dengan baik, begitu juga dengan dalam melakukan pemeriksaan/pengujian kendaraan bermotor, komunikasi yang baik selain antar pegawai UPT. PKB dengan masyarakat diperlukan juga komunikasi yang baik antara atasan dengan bawahan serta komunikasi sesama pegawai diperlakukan agar tidak ada kesalahan dalam melaksanakan tugas karena saling

mendukung. Hal ini bertujuan agar hasil dari pemeriksaan/pengujian kendaraan bermotor berjalan dengan baik. Komunikasi disini yang dimaksud adalah komunikasi antara atasan dan bawahan (penguji).

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Sedarmayanti (2015-51) yaitu, komunikasi yang terjalin dengan baik antar *personal* dan individu pegawai dalam sebuah organisasi baik secara horizontal (antar sesama pegawai) maupun secara vertikal; (antara pemimpin dan bawahan), guna memaksimalkan setiap penyelesaian tugas dan pekerjaan.

Dari hasil wawancara dan penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang ada di UPT. PKB tidak ada masalah mulai dari komunikasi antara atasan dengan bawahan bahwa dalam hal komunikasi pegawai UPT. PKB sebelum melaksanakan pekerjaannya pegawai selalu mendapat arahan dari atasan mereka yaitu Kasubag Tata Usaha, setiap pagi beliau mengecek administrasi terlebih dahulu kemudian memeriksa alat pekerjaan. Jika telah siap semua kemudian beliau melakukan briefing terhadap para pegawai. Hal tersebut dilakukan seminggu dua kali yaitu setiap hari kamis dan jumat. Hal ini bertujuan agar pegawai melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Selanjutnya Komunikasi sesama pegawai UPT.PKB telah baik, yaitu dengan menggunakan HT untuk saling berkomunikasi. Dan yang terakhir adalah komunikasi pegawai/penguji dengan masyarakat, para pegawai telah melakukan tugasnya dengan memberitahu mengenai alur dan prosedur dalam pengujian kendaraan mulai dari proses administrasi sampai dengan pengujian kendaraan. Komunikasi antar Pegawai UPT. PKB dan masyarakat ini menjadi faktor penting. Akan tetapi ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Pegawai UPT. PKB untuk mewujudkan komunikasi yang baik dengan masyarakat, hal ini seperti ketidakpahaman masyarakat tentang prosedur-prosedur administrasi yang harus di ikuti masyarakat untuk memenuhi syarat pemeriksaan/uji kendaraan di UPT. PKB. Dengan adanya kendala tersebut akan mempengaruhi sedikit kinerja pegawai, karena untuk mendapatkan hasil kerja yang lebih baik diperlukan komunikasi yang baik antara Pegawai UPT. PKB dengan masyarakat.

Kedisiplinan

Dalam melakukan suatu pekerjaan tentunya dibutuhkan kedisiplinan yang baik, kedisiplinan didalam pekerjaan yang sesuai dengan instruksi yang diberikan kepada pegawai akan membuat hasil pekerjaan menjadi lebih maksimal. Perilaku individu yang paling utama penentu keberhasilan adalah disiplin pegawai. Disiplin ini dapat dilihat dari pemanfaatan waktu kerja yang baik seperti pemanfaatan terhadap jam istirahat. Selain itu pelaksanaan tugas yang dibebankan juga harus selesai tepat pada waktunya, agar tugas-tugas yang menyusul tidak menumpuk dan tidak menghambat untuk pengerjaan tugas lainnya. Seperti yang dikatakan Hasibuan (dalam Darmawan, 2013;191) yaitu menilai kedisiplinan karyawan dalam mematuhi peraturan yang ada dan mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan instruksi yang diberikan kepadanya. Salah satu instruksi yang diterima berupa perintah melakukan tugas dengan baik. Dalam melaksanakan tugasnya bekerja dalam memeriksa/menguji kendaraan bermotor harus sesuai dengan SOP yang ada. Kehadiran dan kepatuhan pegawaiin pada jam kerja, pegawai melaksanakan tugas tepat waktu dan benar, sehingga dalam pemeriksaan/menguji kendaraan bermotor bisa diselesaikan dengan

tepat waktu, sehingga masyarakat yang sedang memeriksa/melakukan uji kenadaranya di UPT. PKB tidak menunggu lama.

Untuk itu dibutuhkan sikap setia dari pegawai terhadap komitmen yang telah ditetapkan tersebut. Kesetiaan pegawai dalam melaksanakan tugasnya berarti taat dan patuh dalam melaksanakan perintah dari atasan dan peraturan, tata tertib yang telah ditetapkan. Serta ketaatan pegawai dalam menggunakan kelengkapan pakaian seragam yang telah ditentukan organisasi atau lembaga. Untuk disiplin pegawai yaitu penggunaan dan pemeliharaan peralatan yang sebaik-baiknya sehingga dapat menunjang kegiatan kantor berjalan dengan lancar. Serta adanya kesanggupan dalam menghadapi pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang pegawai.

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian mengenai kedisiplinan pegawai UPT.PKB bahwa dapat disimpulkan sudah berjalan dengan baik. Aturanyang diterapkan di UPT.PKB pegawai harus datang jam 7.30 dan pulang sesuai dengan jam pulang. Selain itu ada absen sidik jari untuk kehadiran para pegawai dan juga didalam ruangan Kasubag memiliki monitor untuk mengawasi para pegawai apakah sudah datang dan bekerja. Dan selama ini para pegawai sudah disiplin dalam hal kehadiran dan dalam hal pelaksanaan tugas. Hal ini dilihat dari pemanfaatan waktu masuk kerja dan istirahat dengan baik dan penyelesaian tugas yang diberikan diselesaikan tepat pada waktunya, walaupun masih ada sebagian pegawai ada yang terlambat namun di dalam UPT. PKB diterapkannya peraturan bagi pegawai yang melanggar, melalui teguran lisan dan surat peringatan.

Faktor Penghambat Kinerja Pegawai UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Dalam Memeriksa Kelayakan Kendaraan Bermotor Di Kota Samarinda

Faktor penghambat yang dihadapi oleh Pegawai UPT. PKB dalam memeriksa/menguji kendaraan bermotor adalah peralatan/sarana dan prasarana alat untuk memeriksa atau menguji kendaraan di UPT. PKB sudah sangat canggih dan lengkap, namun terkadang terjadi pada sistem komputer yang diakibatkan virus yang muncul secara tiba-tiba yang kemudian menghambat komputer dalam pengoprasiannya dan terjadi kerusakan pada peralatan uji kendaraan sehingga proses uji terhambat. Langkah atau upaya yang dilakukan ketika komputer terserang virus atau mengalami kerusakan serta alat uji kendaraan juga mengalami kerusakan, maka pegawai/petugas UPT. PKB akan mengadakan perbaikan terlebih dahulu, sementara agar pemeriksaan/uji kendaraan bermotor tetap berjalan, pegawai/petugas UPT. PKB akan menggunakan peralatan lainnya yang masih dalam kondisi baik. Tentu dalam hal tersebut jika terjadi kerusakan terhadap peralatan uji yang dipakai maka akan mengurangi kemaksimalan dalam memberikan kinerja yang baik kepada masyarakat.

Karena peralatan yang biasanya dimaksimalkan dengan menggunakan beberapa unit terpaksa berkurang dikarenakan terjadinya kerusakan pada salah satu peralatan yang digunakan. Hal kedepannya yang harus lebih diperhatikan bahwa perlunya langkah perawatan secara rutin terhadap peralatan yang digunakan misalnya dengan menginstal ulang komputer agar terhindar dari serangan virus-virus komputer serta memasang software anti virus terbaik, kemudian sama halnya dengan peralatan uji kendaraan perlunya langkah pengecekan secara rutin terhadap alat uji agar tidak terjadinya kerusakan fatal.

Mengacu pada pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk peralatan pemeriksaan/uji kendaraan bermotor di UPT. PKB sudah sangat lengkap. Namun terkadang kendala lain yang terjadi ialah gangguan pada sistem komputer yang diakibatkan oleh virus yang muncul tiba-tiba yang kemudian menghambat komputer dalam pengoprasiannya dan juga kendala lain yang terjadi pada alat uji kendaraan yang terkadang mengalami kerusakan, hal ini yang menjadi penghambat lambatnya pengujian dalam pelaksanaan pengujian kelayakan kendaraan bermotor. Upaya yang dilakukan adalah dengan mengadakan perbaikan terhadap peralatan secepat mungkin dan meminimalisir kendala yang ada dengan berbagai upaya.

PENUTUP

Kesimpulan

- a. Hasil kerja dari pegawai UPT. PKB dalam memeriksa/menguji sudah menunjukkan hasil yang maksimal. Hasil kerja UPT. PKB di Kota Samarinda telah mampu mencapai tujuan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 yaitu agar kendaraan bermotor yang akan digunakan di jalan memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan termasuk persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan yang harus dipenuhi. Selain itu secara kuantitas hasil kerja UPT. PKB dengan 7 orang pengujian dapat melakukan pemeriksaan pada ratusan kendaraan dalam sehari dan secara kualitas pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada, akan tetapi belum terlalu optimal, hal ini dapat dilihat dari masih adanya masyarakat yang kurang peduli akan kelayakan kendaraanya sehingga program dan Undang-undang yang ada kurang berjalan dengan baik.
- b. Tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan terutama dalam pemeriksaan/uji kelayakan kendaraan bermotor cukup baik, hal ini dapat dilihat dari adanya buku laporan yang dimiliki oleh pegawai, dimana buku laporan tersebut diisi dengan hal-hal apa saja yang dikerjakan dan buku laporan ini setiap minggunya setiap minggunya diserahkan ke Kepala UPT. PKB. Selain itu kegiatan yang dilakukan UPT. PKB ialah melakukan kegiatan memeriksa kendaraan turun kelapangan langsung yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kecelakaan akibat kendaraan yang tidak layak serta tanggung jawab dalam memelihara dan menjaga sarana dan prasarana yang digunakan juga dapat terlihat dari setiap terjadi kerusakan
- c. Komunikasi pegawai yang ada di UPT.PKB tidak ada masalah mulai dari komunikasi antara atasan dengan bawahan bahwa dalam hal komunikasi pegawai UPT. PKB sebelum melaksanakan pekerjaannya pegawai selalu mendapat arahan dari atasan mereka yaitu Kasubag Tata Usaha, setiap pagi beliau mengecek administrasi terlebih dahulu kemudian memeriksa alat pekerjaan. Komunikasi sesama pegawai UPT.PKB telah baik, yaitu dengan menggunakan HT untuk saling berkomunikasi. Dan yang terakhir adalah komunikasi pegawai/pengujian dengan masyarakat, para pegawai telah melakukan tugasnya dengan memberitahu mengenai alur dan prosedur dalam pengujian kendaraan mulai dari proses administrasi sampai dengan pengujian kendaraan hanya saja komunikasi pegawai dan masyarakat belum bisa dikatakan baik, karena masih terjadi kesalah pahaman komunikasi antara pegawai UPT. PKB dengan masyarakat mengenai prosedur pemeriksaan/pengujian kendaraan bermotor, yang dimana masih ada masyarakat yang kurang memahami prosedur pengujian kendaraan bermotor.

- d. Kedisiplinan pegawai UPT. PKB dalam memeriksa/menguji kelayakan kendaraan bermotor sudah cukup baik, karena pegawai bekerja berdasarkan tugas dan instruksi yang diberikan, walaupun ada beberapa pegawai yang terlambat masuk kerja, tetapi UPT.PKB menerapkan sanksi bagi para pegawai yang melanggar dan tidak mentaati peraturan.
- e. Adapun penghambat yang dihadapi oleh pegawai UPT. PKB adalah adanya gangguan kerusakan pada alat uji, sarana dan prasarana yang dapat menghambat kinerja pegawai, selain itu masyarakat juga kurang paham dengan prosedur yang ada.

Saran

1. Pihak UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor lebih memperhatikan lagi kehadiran, kedatangan dan kepulangan pegawai, termasuk tegas dalam memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar disiplin. Serta pegawai sebaiknya harus tetap konsisten dalam menjalankan peraturan disiplin pegawai secara optimal.
2. Perlu mempertimbangkan pemberian insentif yang berdasarkan beban kerja kepada pegawai.
3. Untuk meningkatkan kompetensi pegawai, maka perlu memperhatikan tingkat pengetahuan dan keahlian, sehingga ada baiknya setiap tahun harus ada perencanaan pendidikan dan pelatihan pegawai.
4. Perlu adanya sosialisasi yang rutin kepada masyarakat akan pentingnya kelayakan kendaraan bermotor dan penjelasan mengenai prosedur persyaratan pembuatan surat kelayakan kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, Melayu SP. 2010. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta : Gava Media.
- Miles, Matthew B, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Edisi Ketiga. Sage Publication, Inc.
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Adminitrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Sedarmayanti. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung : Mandar Maju.
- Simamora, Henry. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Sugiyono. 2008. *Teori Administrasi Publik*, Bandung, Alfabeta.
- Widodo, Joko. 2006. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Jakarta : Bayumedia Publishing

Dokumen-dokumen :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Layak Jalan Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Walikota Samarinda Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Badan Pemerintah Daerah Kota Samarinda.